

Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Perekonomian Rakyat

Oleh: Prof. Mudrajad Kuncoro, PhD
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

Krisis keuangan global 2008 berbeda dengan krisis Asia 1998. Krisis keuangan global dipastikan akan berpengaruh negatif terhadap permintaan domestik, konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Terguncangnya permintaan agregat ini pada akhirnya akan menentukan besaran PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah merespon terhadap krisis global ini dengan mengeluarkan kebijakan yang diharapkan mampu meredam dampak krisis global terhadap perekonomian. UMKM sebagai usaha rakyat pun tidak luput dari pengaruh krisis global. Krisis global telah menyebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa bagi UMKM yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, masih banyak persoalan-persoalan UMKM yang masih belum tuntas diselesaikan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan strategi bagaimana agar UMKM ini bisa tetap "survive" menghadapi "badai" krisis keuangan global. Salah satu caranya adalah memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM.

Konstelasi ekonomi global cenderung berpotensi menggoncang ekonomi Indonesia pada tahun 2008 dan tahun-tahun mendatang. Betapa tidak. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat menja di 1,1%, yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 2% dan 2,8% tahun 2006. Meningkatnya harga minyak dunia, yang pernah menembus hingga US\$147/barel, dan harga-harga komoditas pangan akan membayang-bayangi kinerja perekonomian Indonesia pada tahun ini maupun tahun mendatang.

Menurut IMF, sekitar 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di AS akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Asia sebesar 0,5%-1%. Dampak dari resesi global yang berasal dari resesi

di AS akan mempengaruhi proyeksi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Perekonomian global, diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,4%, yang sebelumnya sebesar 5% pada tahun 2007 menjadi 3,4% pada tahun 2008, bahkan diproyeksikan hanya 0,5% pada tahun 2009. Negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan akan mengalami tekanan yang paling parah akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di AS.

Apa beda dimensi krisis Asia pada tahun 1998 dengan krisis keuangan global 2008? Dimensi krisis Indonesia tahun 1998 ternyata paling parah dibandingkan enam negara Asia lainnya. Demikian catatan Bhanoji Rao dalam buku *East Asian Economies: The Miracle, a Crisis and the Future* (2001). Dalam menghadapi krisis mata uang dan naiknya tingkat suku bunga, kebangkrutan perusahaan dan bank dapat menyebabkan krisis keuangan. *Liquidity crunch* di satu sisi, pesimisme konsumen

dan investor di sisi yang lain, dapat menyebabkan kontraksi investasi, yang diikuti dengan krisis ekonomi dan pengangguran. Hal tersebut menyebabkan krisis sosial dan bahkan krisis politik. Singkatnya, sepuluh tahun lalu, Indonesia mengalami krisis total (kristal) tidak hanya krisis moneter.

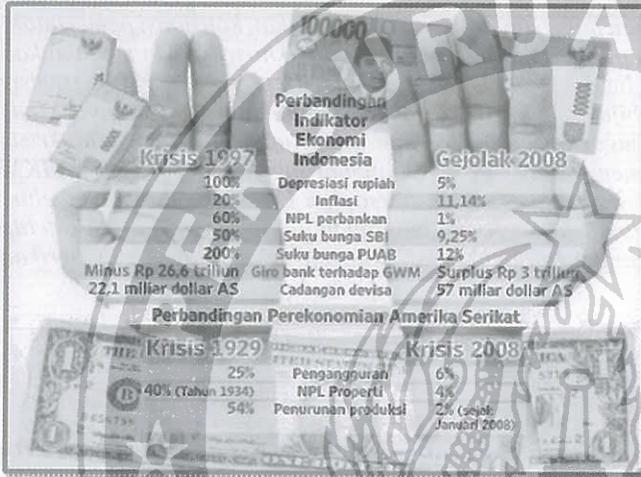
Artikel ini akan membahas tentang perbedaan krisis 1998 dengan krisis 2008. Sampai sejauh mana pengaruh krisis global terhadap perekonomian Indonesia? Apa tantangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tengah krisis global? Sejauh mana respon kebijakan pemerintah dalam meredam dampak krisis global?

KRISIS 1998

Siapa paling terkena dampak krisis 1998? Pertama, perusahaan skala besar yang banyak bermain di pasar global untuk bermain valas, saham, obligasi, dan off-shore loans. Perbankan, pasar modal, dan properti terbukti yang paling menderita akibat krisis saat itu. Kedua, sektor publik yang banyak berutang luar negeri juga terkena dampak krisis. Ketiga, importir atau pelaku bisnis yang kandungan impor bahan baku/penolongnya tinggi.

Gambar 1 membandingkan krisis tahun 1929, 1997, dan 2008. Pada krisis tahun 1929, tingkat pengangguran berada pada kisaran 25%. Kemudian tingkat kredit macet (NPL) sektor properti adalah sebesar 40%. Selain itu terjadi penurunan produksi sebesar 54%. Pada krisis tahun 1997, Indonesia mengalami depresiasi rupiah sebesar 100%, tingkat inflasi sebesar 20%, kredit macet perbankan sebesar 60%, suku bunga SBI sebesar 50%, suku bunga PUAB sebesar 200%, giro bank terhadap Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar minus Rp26,6 triliun, dan cadangan devisa adalah sebesar US\$22,1 miliar.

Pada krisis tahun 2008, gejala ekonomi yang terjadi menyebabkan rupiah terdepresiasi sebesar 5%, inflasi sebesar 11,14%, NPL perbankan sebesar 1%, suku bunga SBI sebesar 9,25%, suku bunga PUAB sebesar 12%, giro bank terhadap GWM sebesar surplus Rp3 triliun, dan cadangan devisa sebesar US\$57 miliar. Selain itu tingkat pengangguran adalah sebesar 6%, NPL properti sebesar 4%, dan terjadi penurunan produksi sebesar 2% (Lihat Gambar 1).



Sumber: Kompas (2008)

1.1. Hancurnya Keajaiban Pertumbuhan Asia

Periode sebelum krisis moneter tahun 1997, perekonomian negara-negara Asia Timur melaju dengan cepatnya. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan di negara-negara tersebut selama empat dekade. Tabel 13.1 memperlihatkan tingkat pertumbuhan perekonomian negara-negara Asia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kategori *The Asia Miracle*. Pertumbuhan Indonesia selama 4 dekade (1961-2000) sangat pesat sekali.

Pada periode 1961-1970 tingkat pertumbuhan Indonesia adalah sebesar 4,2%. Kemudian periode 1971-1980, pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat pesat menjadi 7,9%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama empat dekade terakhir. Selanjutnya pada periode

1981-1990, pertumbuhan Indonesia menurun tapi masih tinggi, yaitu sebesar 6,3%. Kemudian pada periode 1991-2000, pertumbuhan perekonomian Indonesia turun menjadi 4,4% (lihat Tabel 1).

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya tingkat pertumbuhan perekonomian negara-negara *The Asia Miracle*. Pertama, negara-negara tersebut menerapkan kebijakan *outward-looking* dengan penekanannya pada peningkatan nilai ekspor dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Kedua, kebijakan makroekonomi yang tepat dan peran pemerintahan yang efektif di dalam proses alokasi sumber daya ekonomi. Ketiga, semakin membaiknya sektor pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja, dan produktifitas tenaga kerja. Keempat, adanya fleksibilitas

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Negara-negara Asia (%)

Negara	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000
China	3,7	5,4	9,3	10,2
Hong Kong	9,9	9,2	6,6	4,4
Korea	8,3	7,8	8,7	6,3
Taiwan	11,3	9,0	8,0	6,4
Indonesia	4,2	7,9	6,3	4,4
Malaysia	6,5	7,9	6,1	7,2
Philippina	4,9	6,0	1,8	2,9
Singapura	10,0	9,1	7,4	7,8
Thailand	8,2	6,9	7,9	4,6
Bangladesh	4,1	1,6	3,9	4,8
India	3,9	3,1	5,9	5,3
Pakistan	7,3	4,6	6,2	4,0
Sri Lanka	4,6	4,6	4,3	5,2
Japan	10,5	4,5	4,0	1,4

Sumber: Naya dalam Dowling dan Valenzuela (2004)

1.2. Mengapa Perlu Dikaji Ulang?

Bagian ini berusaha mengkaji ulang apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja Negara-negara Asia Timur dari perspektif negara maupun regional dan melihat kembali pengalaman negara-negara tersebut pada tahun 1990-an yang dimodifikasi dan ditegaskan kembali pada awal 1990-an sebagaimana yang yang ditulis oleh Bank Dunia “*East Asian Miracle*” dan publikasi publikasi lainnya.

Pada Agustus 1997, sesaat setelah krisis terjadi di Thailand, Paul Krugman menyatakan tentang karakteristik “ketumpuhan”. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan Asia hanya sekedar hasil keringat bukan inspirasi atau hanya hasil kerja keras, bukan kepandaian. Krugman (1997: 27) berpendapat:

“If there is one thing that believers in an Asian system admire, it is the way Asian governments promote specific industries and technologies;

pasar tenaga kerja yang mendorong pertumbuhan semakin cepat.

Namun, keajaiban-keajaiban pertumbuhan perekonomian di Asia tersebut memiliki kerapuhan. Sayangnya kerapuhan tersebut baru disadari setelah badai krisis moneter melanda negara-negara tersebut pada tahun 1997. Kerapuhan tersebut ialah perhatian penuh kebijakan perekonomian hanya pada pertumbuhan ekonomi saja, sedangkan pembangunan fundamental ekonominya diabaikan. Sehingga secara pertumbuhan tinggi, namun secara fundamental lemah. Padahal fundamental perekonomian sangat penting untuk menopang akselerasi pertumbuhan yang sangat cepat. Kondisi seperti ini disebut sebagai *bubble economy*. Ibarat sebuah gelembung sabun yang terus membesar, namun sangat mudah pecah. Pecahnya gelembung sabun tersebut terjadi pada tahun 1997.

this is supposed to explain their economies' soaring efficiency. But if you conclude that it is mainly perspiration-that efficiency is not soaring- then the brilliance of Asian industrial policies become a lot less obvious. The other unwelcome implication of the perspiration theory was that the pace of Asia's growth was likely to slow. You can get a lot of economic growth by increasing labor force participation, giving everyone a basic education and tripling the investment share of GDP (gross domestic product), but these are one-time unrepeatable changes.

The biggest lesson from Asia's (recent) troubles is not about economics, it is about government. When Asian economics delivered nothing but good news, it was possible to convince yourself that the alleged planners of this knew what they doing. Now the thruth is revealed, they do not have a clue. “

Menurut *East Asian Miracle*, Bank Dunia (1993) dan Ohno (1998), ada 4 elemen utama yang dijadikan pendekatan oleh negara-negara Asia Timur dalam membangun negaranya. Pertama, adalah ketaatan terhadap dasar-dasar manajemen ekonomi makro. Hal ini mencakup:

- Lingkungan bisnis yang stabil, yaitu yang mempunyai laju inflasi rendah sehingga mendorong masuknya investasi;
- Kebijakan fiskal yang bijak dan kontinyu, yang secara aktif melengkapi kebijakan lainnya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang wajar;
- Kebijakan nilai tukar yang bisa mendukung kompetisi ekspor;
- Pembangunan sektor keuangan dan liberalisasi secara progresif untuk memaksimalkan tabungan domestik serta mempromosikan alokasi yang efisien dan integrasi dengan sistem keuangan global;
- Berusaha untuk mengurangi distorsi harga;
- Bertindak untuk mendukung pendidikan dasar dalam rangka menciptakan keahlian yang bisa mendukung pembangunan.

Faktor yang kedua adalah diperlukannya birokrasi yang mampu memahami dan mengimplementasikan rancangan "*strong state*" yaitu negara yang pembangunannya terpusat (*centralized development state*). Selain itu, sistem birokrasi yang dibutuhkan juga harus mempunyai komitmen terhadap pembangunan jangka panjang.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang secara

aktif berusaha meningkatkan peran sektor industri dan ekspor dari hasil industri. Pembangunan yang berorientasi keluar, disertai kebijakan nilai tukar, merupakan sarana untuk mewujudkan keseimbangan eksternal dan meningkatkan permintaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan GDP, mendorong produsen menggunakan teknologi, dan bertahan setelah memenangkan kompetisi.

Alasan bahwa peran pemerintah sangat kuat dijelaskan oleh faktor keempat, yaitu pendekatannya yang pragmatis, dan pengukurannya yang sangat fleksibel dan bahkan tidak digunakan bila tujuan tidak tercapai. Komitmen untuk selalu berkembang dan pembangunan yang efisien dikombinasikan dengan kemampuan pemerintah dalam menerapkan "*strong state*" akan memberikan hasil yang bagus.

Pengalaman pada tahun 1990-an dan hasil penelitian dari beberapa negara menguatkan kembali adanya kesesuaian antara ekonomi makro dan kebijakan sektoral. Tetapi, banyak negara Asia lamban dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang bijak, mendorong perbankan menggunakan sistem manajemen risiko, memperkuat pengawasan perbankan, dan meningkatkan insentif untuk mendukung alokasi aliran modal yang efektif. Akibatnya, penguasa dan dunia perbankan tidak siap menghadapi aliran modal, baik masuk maupun keluar yang sangat besar. Bank juga merasa bersalah karena anjloknya nilai tukar mata uang semakin memperburuk krisis finansial.

Dalam menanggulangi krisis tersebut, ada beberapa pendekatan yang berbeda di setiap negara. Kebijakan fiskal lebih bersifat konservatif dengan menggunakan tekanan deflasi untuk mengatasi akibat buruk krisis. Hal ini juga perlu didukung oleh kemampuan pemerintah dalam mengatur ekonomi dan merespon goncangan ekonomi.

Ada 6 "konsensus" di negara-negara Asia Timur yang meliputi

6 hal. Pertama, pada akhir 1980-an, negara-negara Asia Timur mengalami perkembangan menuju negara industri yang sangat cepat. *Total Factor Productivity* (TFP) selalu meningkat. Penelitian pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa meskipun efisiensi secara teknis meningkat, gap produktivitas antara negara Asia Timur berpendapatan sedang dan negara industri masih besar. Bahkan, kontribusi kemajuan teknis terhadap TFP sangat kecil.

Kedua, ketidakjelasan keuntungan-keuntungan dari aktivitas dan kebijakan industri yang pragmatis yang menggunakan kredit secara langsung dan subsidi untuk membangun subsektor baru. Harga yang tidak sesuai dan subsidi industri untuk periode yang panjang dalam rangka menciptakan eksportir yang agresif, membutuhkan biaya yang banyak dan tidak sesuai dengan peraturan dari *World Trade Organization* (WTO).

Ketiga, hubungan yang sangat erat antara bank dengan perusahaan yang didukung pihak pemerintah, membuat investasi dan bisnis jangka panjang di negara-negara Asia Timur bergairah tetapi juga terjadi mis-alokasi kredit perbankan yang kebanyakan dialokasikan ke real estate, akumulasi aset *nonperforming*, dan rasio kelengkapan perusahaan yang tinggi. Hubungan tersebut juga menghalangi aplikasi *corporate governance*, membatasi perusahaan dari mekanisme pasar, dan menghalangi kompetisi pasar. Dominasi peran perbankan juga menghalangi berkembangnya pasar modal.

Keempat, peran ekspor sebagai "mesin" produktivitas dan perkembangan di Asia Timur juga dipertanyakan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa ekonomi digerakkan oleh investasi dan realokasi sektoral dari pada oleh ekspor. Lainnya, menfokuskan pada investasi dan impor.

Kelima, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah di

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Negara-negara Asia (%)

Negara	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000
China	3,7	5,4	9,3	10,2
Hong Kong	9,9	9,2	6,6	4,4
Korea	8,3	7,8	8,7	6,3
Taiwan	11,3	9,0	8,0	6,4
Indonesia	4,2	7,9	6,3	4,4
Malaysia	6,5	7,9	6,1	7,2
Philippina	4,9	6,0	1,8	2,9
Singapura	10,0	9,1	7,4	7,8
Thailand	8,2	6,9	7,9	4,6
Bangladesh	4,1	1,6	3,9	4,8
India	3,9	3,1	5,9	5,3
Pakistan	7,3	4,6	6,2	4,0
Sri Lanka	4,6	4,6	4,3	5,2
Japan	10,5	4,5	4,0	1,4

Sumber: Naya dalam Dowling dan Valenzuela (2004)

1.2. Mengapa Perlu Dikaji Ulang?

Bagian ini berusaha mengkaji ulang apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja Negara-negara Asia Timur dari perspektif negara maupun regional dan melihat kembali pengalaman negara-negara tersebut pada tahun 1990-an yang dimodifikasi dan ditegaskan kembali pada awal 1990-an sebagaimana yang yang ditulis oleh Bank Dunia “*East Asian Miracle*” dan publikasi-publikasi lainnya.

Pada Agustus 1997, sesaat setelah krisis terjadi di Thailand, Paul Krugman menyatakan tentang karakteristik “ketumpuhan”. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan Asia hanya sekedar hasil keringat bukan inspirasi atau hanya hasil kerja keras, bukan kepandaian. Krugman (1997: 27) berpendapat:

“If there is one thing that believers in an Asian system admire, it is the way Asian governments promote specific industries and technologies;

pasar tenaga kerja yang mendorong pertumbuhan semakin cepat.

Namun, keajaiban-keajaiban pertumbuhan perekonomian di Asia tersebut memiliki kerapuhan. Sayangnya kerapuhan tersebut baru disadari setelah badai krisis moneter melanda negara-negara tersebut pada tahun 1997. Kerapuhan tersebut ialah perhatian penuh kebijakan perekonomian hanya pada pertumbuhan ekonomi saja, sedangkan pembangunan fundamental ekonominya diabaikan. Sehingga secara pertumbuhan tinggi, namun secara fundamental lemah. Padahal fundamental perekonomian sangat penting untuk menopang akselerasi pertumbuhan yang sangat cepat. Kondisi seperti ini disebut sebagai *bubble economy*. Ibarat sebuah gelembung sabun yang terus membesar, namun sangat mudah pecah. Pecahnya gelembung sabun tersebut terjadi pada tahun 1997.

this is supposed to explain their economies' soaring efficiency. But if you conclude that it is mainly perspiration-that efficiency is not soaring- then the brilliance of Asian industrial policies become a lot less obvious. The other unwelcome implication of the perspiration theory was that the pace of Asia's growth was likely to slow. You can get a lot of economic growth by increasing labor force participation, giving everyone a basic education and tripling the investment share of GDP (gross domestic product), but these are one-time unrepeatable changes.

The biggest lesson from Asia's (recent) troubles is not about economics, it is about government. When Asian economics delivered nothing but good news, it was possible to convince yourself that the alleged planners of this knew what they doing. Now the thruth is revealed, they do not have a clue. “

Menurut *East Asian Miracle*, Bank Dunia (1993) dan Ohno (1998), ada 4 elemen utama yang dijadikan pendekatan oleh negara-negara Asia Timur dalam membangun negaranya. Pertama, adalah ketaatan terhadap dasar-dasar manajemen ekonomi makro. Hal ini mencakup:

- Lingkungan bisnis yang stabil, yaitu yang mempunyai laju inflasi rendah sehingga mendorong masuknya investasi;
- Kebijakan fiskal yang bijak dan kontinyu, yang secara aktif melengkapi kebijakan lainnya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang wajar;
- Kebijakan nilai tukar yang bisa mendukung kompetisi ekspor;
- Pembangunan sektor keuangan dan liberalisasi secara progresif untuk memaksimalkan tabungan domestik serta mempromosikan alokasi yang efisien dan integrasi dengan sistem keuangan global;
- Berusaha untuk mengurangi distorsi harga;
- Bertindak untuk mendukung pendidikan dasar dalam rangka menciptakan keahlian yang bisa mendukung pembangunan.

Faktor yang kedua adalah diperlukannya birokrasi yang mampu memahami dan mengimplementasikan rancangan "*strong state*" yaitu negara yang pembangunannya terpusat (*centralized development state*). Selain itu, sistem birokrasi yang dibutuhkan juga harus mempunyai komitmen terhadap pembangunan jangka panjang.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang secara

aktif berusaha meningkatkan peran sektor industri dan ekspor dari hasil industri. Pembangunan yang berorientasi keluar, disertai kebijakan nilai tukar, merupakan sarana untuk mewujudkan keseimbangan eksternal dan meningkatkan permintaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan GDP, mendorong produsen menggunakan teknologi, dan bertahan setelah memenangkan kompetisi.

Alasan bahwa peran pemerintah sangat kuat dijelaskan oleh faktor keempat, yaitu pendekatan yang pragmatis, dan pengukurannya yang sangat fleksibel dan bahkan tidak digunakan bila tujuan tidak tercapai. Komitmen untuk selalu berkembang dan pembangunan yang efisien dikombinasikan dengan kemampuan pemerintah dalam menerapkan "*strong state*" akan memberikan hasil yang bagus.

Pengalaman pada tahun 1990-an dan hasil penelitian dari beberapa negara menguatkan kembali adanya kesesuaian antara ekonomi makro dan kebijakan sektoral. Tetapi, banyak negara Asia lamban dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang bijak, mendorong perbankan menggunakan sistem manajemen risiko, memperkuat pengawasan perbankan, dan meningkatkan insentif untuk mendukung alokasi aliran modal yang efektif. Akibatnya, penguasa dan dunia perbankan tidak siap menghadapi aliran modal, baik masuk maupun keluar yang sangat besar. Bank juga merasa bersalah karena anjloknya nilai tukar mata uang semakin memperburuk krisis finansial.

Dalam menanggulangi krisis tersebut, ada beberapa pendekatan yang berbeda di setiap negara. Kebijakan fiskal lebih bersifat konservatif dengan menggunakan tekanan deflasi untuk mengatasi akibat buruk krisis. Hal ini juga perlu didukung oleh kemampuan pemerintah dalam mengatur ekonomi dan merespon goncangan ekonomi.

Ada 6 "konsensus" di negara-negara Asia Timur yang meliputi

6 hal. Pertama, pada akhir 1980-an, negara-negara Asia Timur mengalami perkembangan menuju negara industri yang sangat cepat. *Total Factor Productivity* (TFP) selalu meningkat. Penelitian pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa meskipun efisiensi secara teknis meningkat, gap produktivitas antara negara Asia Timur berpendapatan sedang dan negara industri masih besar. Bahkan, kontribusi kemajuan teknis terhadap TFP sangat kecil.

Kedua, ketidakjelasan keuntungan-keuntungan dari aktivitas dan kebijakan industri yang pragmatis yang menggunakan kredit secara langsung dan subsidi untuk membangun subsektor baru. Harga yang tidak sesuai dan subsidi industri untuk periode yang panjang dalam rangka menciptakan eksportir yang agresif, membutuhkan biaya yang banyak dan tidak sesuai dengan peraturan dari *World Trade Organization* (WTO).

Ketiga, hubungan yang sangat erat antara bank dengan perusahaan yang didukung pihak pemerintah, membuat investasi dan bisnis jangka panjang di negara-negara Asia Timur bergairah tetapi juga terjadi mis-alokasi kredit perbankan yang kebanyakan dialokasikan ke real estate, akumulasi aset *nonperforming*, dan rasio kelengkapan perusahaan yang tinggi. Hubungan tersebut juga menghalangi aplikasi *corporate governance*, membatasi perusahaan dari mekanisme pasar, dan menghalangi kompetisi pasar. Dominasi peran perbankan juga menghalangi berkembangnya pasar modal.

Keempat, peran ekspor sebagai "mesin" produktivitas dan perkembangan di Asia Timur juga dipertanyakan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa ekonomi digerakkan oleh investasi dan realokasi sektoral dari pada oleh ekspor. Lainnya, menfokuskan pada investasi dan impor.

Kelima, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah di

negara-negara Asia Timur di mana pemerintah hanya pantas menerima yang baik-baik saja (*fresh look*). Penurunan kinerja pemerintah pada akhir 1996 dan masalah-masalah yang timbul memperlihatkan bahwa struktur pemerintah yang

berdasar kekeluargaan dan kepemilikan perusahaan oleh keluarga seharusnya disesuaikan dengan ekonomi global. Solusinya adalah dengan menerapkan *good corporate governance*.

Yang terakhir adalah integrasi antar daerah secara progresif sebagai sebuah ekonomi dunia karena adanya aliran perdagangan dan faktor-faktor ekonomi. Sekarang, setiap negara di dunia harus menyadari arti pentingnya saling ketergantungan dan koordinasi setiap kegiatan ekonominya.

2. KRISIS 2008

Bagaimana dengan krisis keuangan global 2008? Latar belakang dan kronologis krisis keuangan global 2008 secara runtut dan gamblang telah diuraikan dalam buku "Memahami Krisis Keuangan Global" (2008), yang diterbitkan oleh tim Departemen Komunikasi dan Informatika RI. Dampak krisis keuangan AS menjalar ke Eropa dan Asia Pasifik dalam bentuk bangkrutnya bank/institusi keuangan/korporasi, meningkatnya inflasi, menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan runtuhnya indeks bursa saham.

Terjadinya krisis bermula dari kasus *subprime mortgage* yang terjadi di AS. *Subprime mortgage* merupakan instrumen kredit untuk sektor properti. AS sudah sejak lama memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang *mortgage*. Undang-undang *mortgage* ini berisikan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit pemilikan rumah. Semua warga AS –jika memenuhi persyaratan tertentu— bisa mendapatkan kemudahan kredit kepemilikan properti, seperti KPR. Namun, kemudahan pemberian kredit dan kegairahan pasar properti di AS, menyebabkan spekulasi di sektor ini terus meningkat (Depkominfo, 2008: 4).

Kesalahan terbesarnya adalah pemberian *subprime mortgage* lebih banyak kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan kredit perumahan. Dikatakan tidak layak karena penduduk tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyelesaikan tanggungan

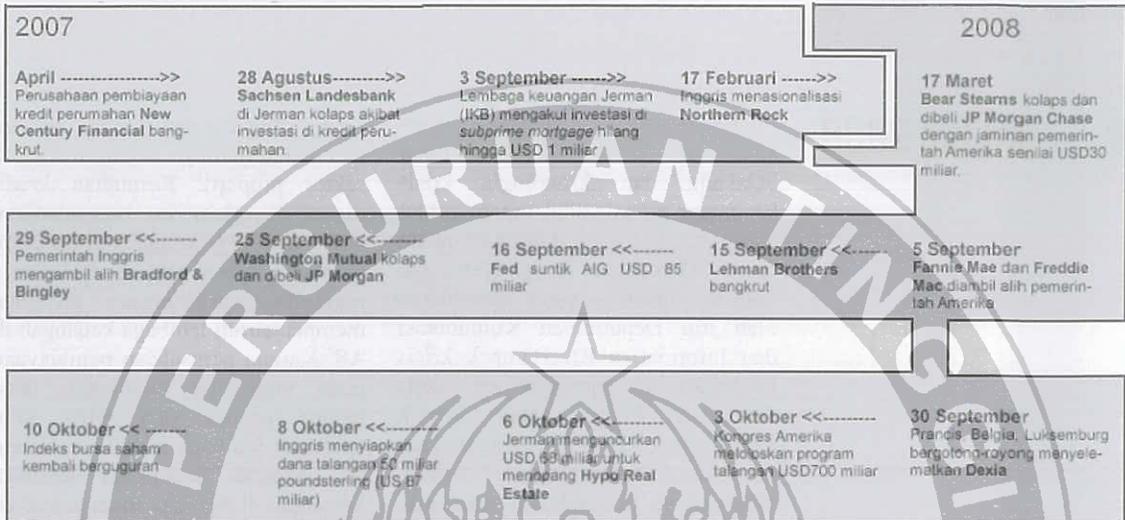
kredit yang mereka pinjam. Hal ini memicu terjadinya kredit macet di sektor properti. Kemudian kredit macet di sektor ini menyebabkan kolapsnya perusahaan-perusahaan pembiayaan besar di AS. Kolapsnya perusahaan pembiayaan ini juga mempengaruhi lembaga keuangan di AS. Karena perusahaan pembiayaan pada umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan. Selain itu, dampak kolapsnya lembaga keuangan di AS juga mempengaruhi lembaga investasi dan investor di berbagai penjuru dunia. Karena surat utang perusahaan pembiayaan kredit properti juga dijual kepada lembaga keuangan dan investor asing. Padahal surat utang tersebut ditopang oleh debitor yang kemampuan membayarnya rapuh.

Gambar 2 merangkum kronologis krisis keuangan global yang menghancurkan lembaga-lembaga keuangan. Pada bulan April tahun 2007 perusahaan pembiayaan kredit perumahan New Century Financial bangkrut. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2007 Sachsen Landesbank di Jerman kolaps akibat investasi di kredit perumahan. Tanggal 3 September 2007 lembaga keuangan Jerman (IKB) kehilangan investasinya di *subprime mortgage* sebesar US\$1 miliar.

Selanjutnya pada tanggal 17 Februari Inggris menasionalisasi Northern Rock. Tanggal 17 Maret 2008 perusahaan Bear Stearns kolaps dan dibeli oleh JP Morgan Chase dengan jaminan pemerintah AS senilai US\$30 miliar. Tanggal 5

September 2008 perusahaan Fannie Mae dan Freddie Mac diambil alih pemerintah AS. Kemudian tanggal 15 September 2008 perusahaan Lehman Brothers bangkrut. Tanggal 16 September 2008, The Fed menyuntikan dana sebesar US\$85 miliar kepada AIG. Selanjutnya tanggal 10 Oktober 2008 indeks bursa saham seluruh dunia kembali berguguran (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Kronologis Krisis Keuangan Global 2008



Sumber: Kompas dalam Depkominfo (2008)

3. DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP INDONESIA

Kuatnya pengaruh sentimen negatif global menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi di akhir triwulan ketiga yang menurun tajam sebesar 22,0% menjadi level 1.833, dibanding posisi IHSG akhir Tw.II-2008. Walaupun demikian, beberapa saham unggulan masih menarik minat investor asing, yaitu di antaranya saham sektor perbankan (BCA, BRI, Mandiri), sektor pertambangan (PGN, Adaro Energy, Bumi Resources), sektor telekomunikasi (Indosat, Telkom) dan sektor perkebunan (Astra Agro Lestari) (BI, 2008). Hal ini didukung oleh peningkatan profitabilitas perusahaan, khususnya *Return On Equity* (ROE), pada periode laporan. Bila dirinci secara sektoral, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian serta pertambangan mencatat kenaikan tingkat pengembalian (*return*) yang lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya.

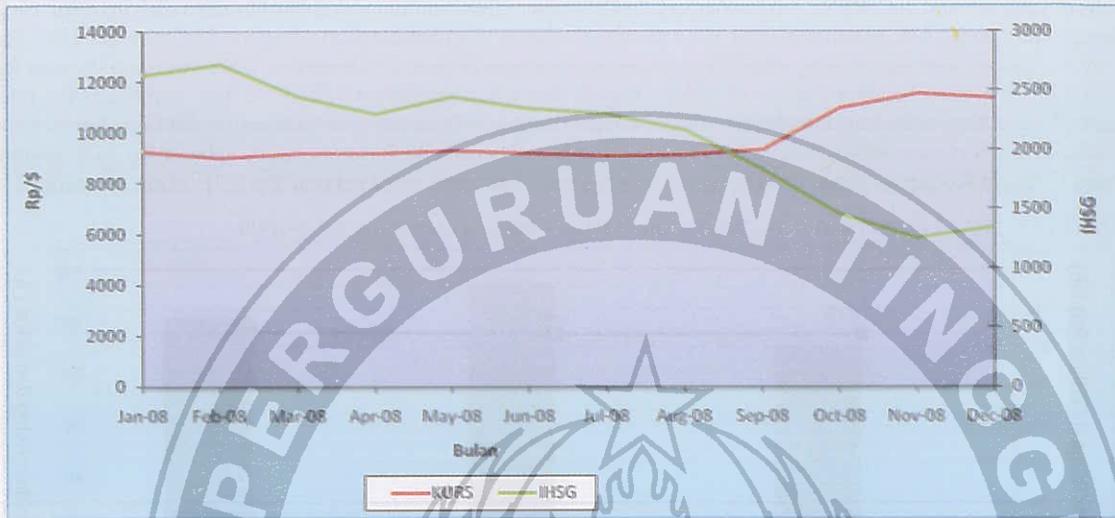
Dari sisi suplai, pada periode

triwulan III 2008 terdapat penawaran saham baru (IPO) oleh 6 emiten dan right issue sebanyak 10 emiten (BI, 2008). Enam emiten baru tersebut adalah Adaro Energy, Destinasi Tirta Nusantara, Hotel Mandarine Regency, Kertas Basuki Rachmat Ind., Bayan Resources, dan Trada Maritime. Sedangkan 1 emiten tercatat melakukan *delisting* dari bursa, yaitu Bahtera Adimina Samudra Tbk. Kondisi likuiditas keuangan global yang ketat dan pada waktu bersamaan persepsi risiko terhadap negara *emerging markets* meningkat menyebabkan IHSG terkoreksi di akhir triwulan empat yang menurun tajam sebesar 26,04% menjadi 1.355,4 dibanding posisi IHSG akhir Tw.III-2008. Dari sisi suplai, pada periode triwulan IV-2008 terdapat penawaran saham baru (IPO) oleh 1 emiten, yaitu Sekawan Intipratama Tbk. Sedangkan 3 emiten tercatat melakukan *delisting* dari bursa, yaitu Bank Lippo Tbk, Texmaco Jaya dan

Bank UOB Buana Tbk.

Krisis keuangan global terbukti memporakporandakan pasar modal dan valas. IHSG anjlok dari 2.830 menjadi 1.111, atau turun lebih dari 60%. Nilai kurs rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi cukup dramatis dari Rp 9.076 hingga sempat hampir menembus Rp13.000, atau mengalami depresiasi lebih dari 30% sejak Januari

Gambar 12.3. Kurs Rupiah/USD dan IHSG, Januari 2008-Desember 2008

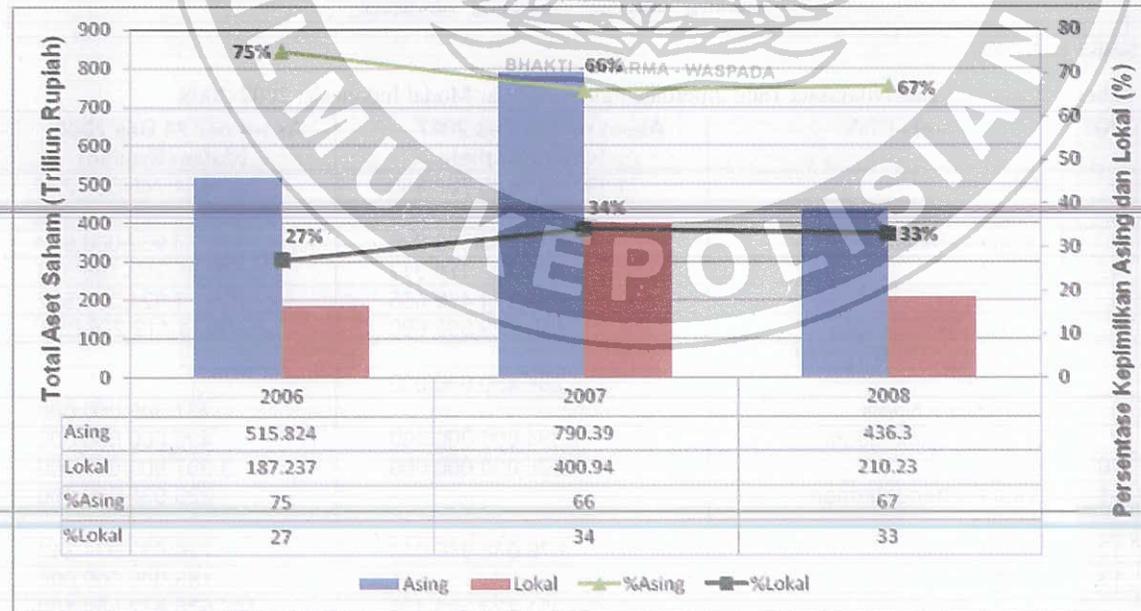


Sumber: Bank Indonesia (2009) dan BEI (2009)

2008. Volatilitas memang meningkat tajam di pasar valas dan modal yang terintegrasi dengan pasar keuangan global ini (lihat Gambar 3).

Tekanan yang terjadi pada pasar modal Indonesia menyebabkan terjadinya merosotnya likuiditas di sektor perbankan dan institusi keuangan nonbank yang disertai berkurangnya transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan

Gambar 4. Porsi Kepemilikan Asing dan Lokal di Pasar Modal Indonesia, 2006-2008

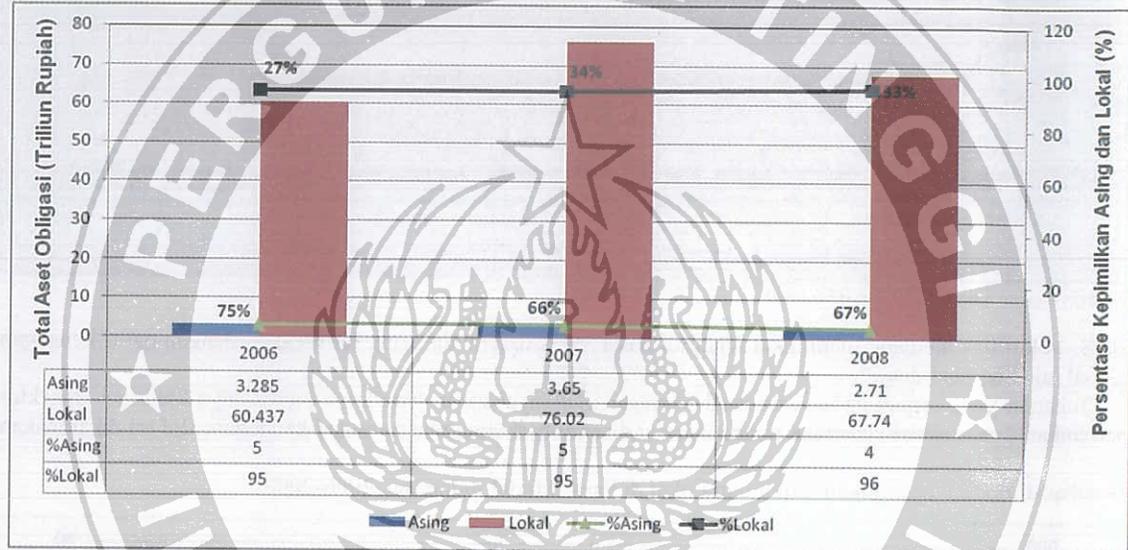


Sumber: KSEI (2008)

banyaknya investor dari institusi keuangan AS yang melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk menyelamatkan perusahaan mereka sendiri yang terkena krisis keuangan. Porsi kepemilikan investor asing dalam saham di Indonesia selama 2006-2008 memang cukup tinggi, berkisar antara 66-67% (lihat Gambar 4).

Secara umum, terjadi penurunan total aset yang tercatat di C-BEST (*Central Depository and Book Entry Settlement System*) sampai dengan tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 746,64 triliun. Penurunan aset ini sebesar menurun 42% dibanding dengan data per 28 Desember 2007 sebesar Rp 1.298,251 triliun (lihat Tabel 2). Total aset saham yang tercatat di C-BEST sampai dengan 24 Desember 2008 didominasi kepemilikannya oleh investor asing dengan jumlah Rp 436,30 triliun (67%), yang menurun sebesar 1% dibandingkan data pada 28 Desember 2007 (Rp 790,39 triliun); aset saham yang dimiliki investor lokal sampai dengan 24 Desember 2008 sebesar 33% atau Rp 210,23 triliun, yang berarti menurun 1% dibandingkan data tahun sebelumnya (KSEI, 2008). Sementara itu, total aset Obligasi Korporasi yang tercatat di C-BEST sampai dengan 24 Desember 2008 mayoritas dimiliki oleh investor lokal Rp 67,74 triliun (96%), yang turun 1% dibandingkan data pada 28 Desember 2007 sebesar Rp 76,02 triliun. Aset Obligasi Korporasi yang dimiliki investor asing pada saat yang sama sebesar Rp 2,71 triliun, menurun 1%

Gambar 5. Porsi Kepemilikan Asing dan Lokal di Pasar Obligasi Indonesia, 2006-2008



Sumber: KSEI (2008)

Tabel 2. Jenis Efek dan Nilai Aset Yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, 2007-2008

No	Jenis Efek	Asset per 28 Des 2007 (dalam Rupiah)	Asset per 24 Des 2008 (dalam Rupiah)
1.	Saham	1.191.331.895.702.890	646.534.265.887.226
2.	Obligasi Korporasi	79.666.902.093.257	70.442.620.073.989
3.	Obligasi Pemerintah	10.670.030.000.000	15.273.932.000.000
4.	Waran	10.375.422.178.912	1.585.258.166.993
5.	HMETD	8.114.479.635	1.821.254.502
6.	Medium Term Notes	2.944.529.595.690	7.734.412.266.050
7.	Negotiable Certificate of Deposits	256.490.000.000	
8.	Promissory Notes		137.300.000.000
9.	Sertifikat Bank Indonesia	1.394.800.000.000	490.000.000.000
10.	Sukuk	1.025.000.000.000	3.307.800.000.000
11.	Surat Perbendaharaan Negara	-	220.930.000.000
12.	Mutual Fund	578.038.945.040	725.532.931.340
13.	SBSN		185.000.000.000
	Total	1.298.251.222.995.430	746.638.872.580.100

Sumber: KSEI (2008)

dibandingkan data pada 28 Desember 2007 sebesar Rp 3,65 triliun (lihat Gambar 5).

Krisis finansial global yang terjadi ternyata tidak mematikan semangat investor asing untuk berinvestasi di pasar saham. Berdasarkan pantauan manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kepemilikan asing meningkat sebanyak 10 persen dari total saham yang dimilikinya. Sebagai informasi data di Kustodian Sentral Efek Indonesia, menunjukkan penambahan investor asing kira-kira 10 hingga 15 persen dari total saham yang mereka miliki (KSEI, 2008). Dengan peningkatan kepemilikan itu pula diharapkan transaksi harian akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan angka IHSG. Tetapi, sebaliknya ternyata jumlah dana asing di Surat Utang Negara (SUN) berdasarkan data Depkeu, kembali menyusut. Di awal Maret ini kepemilikan asing di SUN menciut jadi Rp 79,24 triliun yang merupakan posisi terendah sejak Maret 2008. Dana SUN tersebut paling banyak dimiliki kalangan perbankan Rp 278,58 triliun, Bank Indonesia Rp 28,35 triliun, dan nonbank Rp 244,42 triliun. Kepemilikan asing di SUN pernah mencapai angka tertinggi Rp 106,66 triliun pada Agustus 2008. Total kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan per 3 Maret 2009 mencapai Rp 551,35 triliun (Suara Karya, 2009).

Bagaimana dengan investor lokal? Tabel 3 menunjukkan investor lokal didominasi oleh investor korporasi dengan kepemilikan saham 19,56%, diikuti oleh investor individual, perusahaan sekuritas, perusahaan reksadana, asuransi, dana pensiun, yayasan, dan lain-lain. Dengan kata lain, pasar modal Indonesia amat didominasi oleh investor asing dan korporat. Kedua pelaku ini memegang kepemilikan saham hingga 87%.

Tabel 3. Kepemilikan Saham Milik Asing dan Domestik, 2006-2007

Pemegang surat berharga	Jumlah rekening (Mei 2007)	Nilai (Rp miliar) Desember 2006	% Kepemilikan	Nilai (Rp miliar) Mei 2007	% Kepemilikan	Perubahan Nilai (Rp miliar)
Investor Lokal						
Insurance	146	10,082.03	1.42	15,490.43	1.81	5,408.40
Mutual Funds	156	11,982.05	1.68	16,137.20	1.89	4,155.16
Pension Funds	340	7,126.32	1.00	9,240.33	1.08	2,114.01
Financial Institutions	54	3,305.99	0.46	3,926.40	0.46	620.41
Corporate	1,375	111,678.36	15.69	167,230.53	19.56	55,552.17
Securities Companies	309	15,745.64	2.21	26,559.25	3.11	10,813.62
Foundation	37	433.88	0.06	734.51	0.09	300.63
Individual	58,539	28,749.79	4.04	41,637.58	4.87	12,887.79
Others	59	237.40	0.03	269.10	0.03	31.70
Sub Total	61,015	189,341.44	26.60	281,225.32	32.89	91,883.88
Asing	3,789	522,341.16	73.40	573,857.86	67.11	51,516.70
Grand Total	64,804	711,682.60	100.00	855,083.18	100.00	143,400.58

Sumber: KSEI (2007)

Selain itu krisis keuangan global juga memiliki *indirect effect* bagi perekonomian Indonesia (Depkominfo, 2008), yaitu: (1) mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam bentuk pengurangan likuiditas, lonjakan suku bunga, anjloknya harga komoditas, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana; (2) menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada; (3) *flight to quality*, pasar modal Indonesia terkoreksi akibat indikasi melemahnya mata uang rupiah; (4) kurangnya pasokan likuiditas di sektor keuangan karena kebangkrutan berbagai institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi akan berdampak pada *cash flow sustainability* perusahaan-perusahaan besar di Indonesia; (5) menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan menyebabkan defisit perdagangan yang semakin melebar dalam beberapa waktu mendatang; dan (6) defisit perdagangan akan menyulitkan penggalangan capital inflow dalam jumlah besar untuk menutup defisit itu sendiri seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global.

4. TUJUH TANTANGAN UMKM DI TENGAH KRISIS

Tidak diragukan bahwa fundamental makroekonomi dan kinerja sektor riil Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda krisis, meski krisis keuangan mengguncang Amerika Serikat dan Eropa. Krisis global ini memang sempat mengguncang pasar modal dan valas di Indonesia. Bursa Efek Indonesia terpaksa di-suspend setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 10% untuk kedua kalinya dalam waktu tiga hari, dan sempat bertengger di posisi 1.451. Pada Oktober 2008, kurs sempat menyentuh level Rp 9.870 per US\$.

Namun, seberapa jauh krisis ini akan berdampak pada sektor riil, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM), tampaknya perlu diantisipasi. Kewaspadaan diperlukan walaupun pemerintah optimistis bahwa fundamental perekonomian nasional masih cukup kuat untuk menyangga sektor riil. Saat ini, BI Rate yang tinggi, mencapai 9,5%, tentu merupakan kebijakan yang paling dilematis yang ditempuh bank sentral. Tidak menaikkan BI Rate, membuat nilai tukar rupiah terus merosot dan terlebih lagi inflasi akan menggerogoti daya beli masyarakat kelas menengah bawah atau yang berpenghasilan tetap.

Kenaikan BI Rate dapat dipastikan mendorong kenaikan bunga deposito yang menggembirakan bagi para pemilik modal. Namun, kenaikan bunga pinjaman justru sebaliknya, membuat pengusaha berteriak. Ketatnya likuiditas dan naiknya biaya dana perbankan akan membuat kredit menjadi mahal dan sulit didapatkan. Kenaikan suku bunga ini akan menjadi batu sandungan bagi target pertumbuhan ekonomi pada 2008. Kenaikan suku bunga justru akan menambah persoalan baru pada saat pasar modal tidak bisa diandalkan.

Krisis ini juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan hampir seluruh sektor di Indonesia. Lima sektor yang terkena dampak paling besar dari krisis keuangan global

dan kenaikan BI Rate adalah sektor perbankan, pertanian, industri, pertambangan, dan telekomunikasi.

Naiknya BI Rate tentu saja akan memperketat likuiditas dananya, sehingga gelontoran dana untuk sektor industri pun terhambat karena tingginya suku bunga yang diterapkan perbankan. Hal ini akan menyebabkan pengusaha sulit mencari pinjaman, sehingga ekspansi usaha juga sulit dilakukan. Banyak yang memperkirakan sektor pertanian paling kecil terkena dampak krisis. Selain memiliki mekanisme pembiayaan sendiri, sektor pertanian juga tidak ada di pasar saham, tetapi krisis ini berakibat pada *market demand*-nya.

Sektor industri diperkirakan cepat atau lambat terkena dampak krisis. Masalah struktural yang dihadapi industri nasional adalah masih tingginya kandungan impor bahan baku dari seluruh industri manufaktur. Kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri 28%-40%. Tujuan ekspor industri utama Indonesia memang AS. Pada Januari-Agustus 2008, pasar AS menyerap US\$8,5 miliar, sekitar 11,58% dari total nilai ekspor nonmigas Indonesia yang mencapai US\$73,54 miliar.

Penyerapan pasar AS bukan hanya penting, melainkan juga karena besarnya pangsa negara itu. Para pengusaha di sektor industri berteriak agar pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan impor, sehingga pasar domestik aman. Saat ini, banyak eksportir dari luar negeri yang mencari alternatif negara tujuan ekspor selain AS, sehingga apabila Indonesia tidak memperketat aturan impor, ditakutkan akan banyak produk ilegal yang masuk ke negara ini.

Pada saat krisis melanda negeri ini, 1997-1998, perusahaan berskala besar (baca: konglomerat) yang selama era Orde Baru dipuji sebagai aset nasional untuk menggerakkan perekonomian, akhirnya rontok juga.

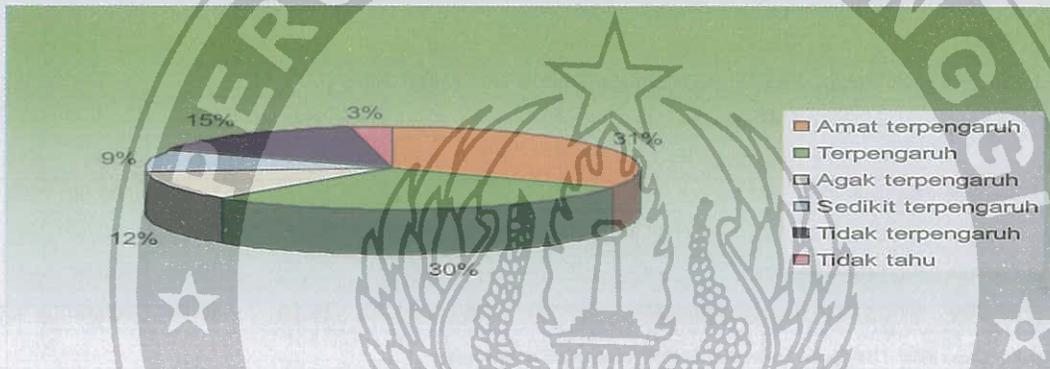
Sejarah mencatat konglomerat Indonesia terbukti rapuh saat krisis.

Namun UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena: pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*. Ketiga, menggunakan input lokal.

Keempat, berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri.

Namun, daya tahan UKM pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) benar-benar diuji. Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pada 23 Mei 2008 sangat memengaruhi kondisi usaha UKM. Survei terhadap pelaku UKM di DI Yogyakarta menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM menyebabkan 18.734 pelaku usaha tersebut di daerah ini semakin terpuruk, bahkan kreditnya terancam macet. Berdasarkan pengakuan UKM, sebanyak 73% dari total responden mengatakan usaha mereka terpengaruh oleh dampak kenaikan harga BBM. Gambar 6 memperlihatkan bahwa 31% di antaranya amat terpengaruh karena biaya BBM mencapai di atas

Gambar 6. Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap UMKM di DIY

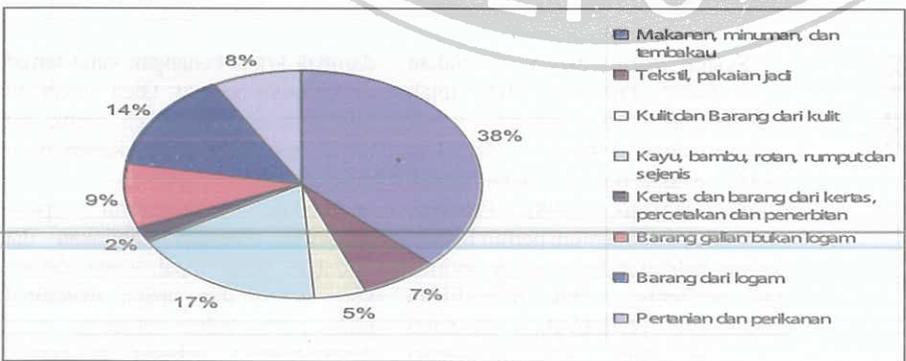


Sumber: Diolah dari data primer dalam Kuncoro et al. (2008)

50% dari total biaya produksi, 30% mengaku terpengaruh karena biaya BBM antara 20-50% dari total biaya produksi, dan 12% lainnya agak terpengaruh karena biaya BBM antara 10-20% dari total biaya produksi. Dari total responden yang mengaku sangat terpengaruh kenaikan harga BBM di atas, sebagian besar adalah UMKM yang bergerak sektor makanan, minuman dan tembakau (38%). Lainnya, 17% adalah UMKM yang bergerak di sektor kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya dan 14% adalah UMKM yang bergerak di sektor barang dari logam (lihat Gambar 7).

Survei ini sejalan dengan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi usaha mikro sebesar 34%, usaha kecil 24,6%, dan usaha

Gambar 7. Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap UMKM Menurut Sektor di DIY



Sumber: Diolah dari data primer dalam Kuncoro et al. (2008)

menengah 129,6% (Kompas, 2008).

Apa tantangan yang dihadapi UKM? Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

Kedua, akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah memiliki badan hukum (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi).

Keempat, tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006. Penyebabnya adalah eksportir masih menunggu order dari pembeli/pelanggan dari luar negeri, faktor musim di negara mitra dagang ikut berpengaruh, dan belum stabilnya bisnis UKM yang berorientasi ekspor. UMKM memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati ranking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. UMKM (Usaha Kecil & Menengah) juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, namun kontribusi UMKM jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi usaha besar (lihat Tabel 4). UMKM mampu menyumbang ekspor nonmigas sebesar 19,2% hingga hampir 22% selama 2002-2005. Pada UMKM, penyumbang terbesar

Tabel 4. Perkembangan Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha Tahun 2002-2005

Thn	Nilai (Miliar RP)					Peranan (%)				
	UK	UM	UMKM	UB	Total	UK	UM	UMKM	UB	Total
2002	20.469	66.821	87.290	311.916	399.206	5,13	16,74	21,87	78,13	100,00
2003	19.941	57.156	77.097	305.437	382.534	5,21	14,94	20,15	79,85	100,00
2004	24.408	71.140	95.548	375.242	470.790	5,18	15,11	20,30	79,70	100,00
2005*	27.700	81.429	109.129	460.460	569.588	4,86	14,30	19,16	80,84	100,00

Keterangan: UK=Usaha Kecil, UM=Usaha Menengah, UMKM=Usaha Kecil & Menengah, UB=Usaha Besar

Sumber: Menekop dan UMKM dan BPS (2005)

ekspor non-migas juga sektor industri pengolahan, terutama garmen, tekstil dan produk tekstil, dan sepatu.

Kelima, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku adalah mahalnnya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. Ini karena bahan baku bagi UKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari luar daerah usahan tersebut berlokasi.

Keenam, masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampil dan mahalnnya biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.

Ketujuh, dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.

5. RESPON KEBI- JAKAN PEMERIN- TAH

Sejauh mana respons kebijakan pemerintah? Presiden SBY telah memberikan 10 arahan untuk mengantisipasi krisis keuangan global sebagai berikut (Depkominfo, 2008; Kuncoro, 2008): Pertama, memelihara momentum pertumbuhan. Semua kalangan harus tetap optimis dan bersinergi untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi dan mengelola serta mengatasi

dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kita semua tidak boleh panik dan harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Kedua, optimalkan pasar domestik. Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, serta dengan kerja keras dan upaya maksimal, nilai pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan sebesar 6 persen.

Komponen yang perlu dijaga antara lain: konsumsi, belanja pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan perekonomian domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 1998, di mana sabuk pengaman perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal.

Ketiga, penanggulangan kemiskinan. Optimasi APBN 2009 perlu dilakukan untuk memacu pertumbuhan dan membangun *social safety net*. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu, penyediaan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas, defisit anggaran harus “tepat” dan “rasional” atau tidak mengganggu pencapaian sasaran “kembar” (*growth with equity*).

Keempat, dunia usaha harus tetap bergerak agar penerimaan negara tetap terjaga dan pengangguran tidak bertambah. Bank Indonesia dengan jajaran perbankan diharapkan terus mengembangkan kebijakan agar kredit dan likuiditas tersedia. Sementara, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan regulasi iklim dan insentif.

Kelima, tingkatkan nilai tambah produk RI agar lebih kompetitif. Semua pihak agar cerdas menangkap peluang untuk melakukan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat.

Keenam, kampanye konsumsi produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. Menteri terkait diimbau untuk memberikan insentif/disinsentif agar masyarakat Indonesia tetap menggunakan produksi dalam negeri serta mencegah dumping barang luar negeri ke pasar dalam negeri. Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran pemerintah agar dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah (*procurement*) lebih mengutamakan produk industri nasional.

Ketujuh, perkokoh kemitraan antara pemerintah, BI, perbankan dan dunia usaha. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan yang berkaitan dengan

neraca pembayaran.

Kedelapan, hentikan sikap ego sektoral dan memandang remeh masalah. Presiden menegaskan pentingnya kerjasama yang terkoordinasi antarinstansi terkait.

Kesembilan, hentikan politik partisan dalam menghadapi krisis global dan Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan pribadi. Berkaitan dengan tahun 2008 dan 2009 yang merupakan tahun politik dan tahun Pemilu, maka Presiden meminta semua kalangan untuk melakukan langkah dan kebijakan bagi kepentingan rakyat.

Kesepuluh, jalin komunikasi yang jujur dan bijak terhadap rakyat. Presiden meminta semua pihak untuk melakukan komunikasi sejujurnya kepada masyarakat. Memberikan buktinyatentang apa saja yang sudah dijanjikan kepada masyarakat serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan. Namun, informasi tersebut harus tetap positif dan optimistis sehingga tidak menimbulkan kepanikan dalam masyarakat.

6. USULAN STIMULAN KEBIJAKAN LEBIH LANJUT

Bagi pelaku bisnis di sektor riil nampaknya dibutuhkan stimulan kebijakan yang lebih mendasar. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran nampaknya akan dirasakan pada semester pertama 2009, tahun di mana Indonesia sibuk menyelenggarakan pemilu memilih wakil rakyat dan presiden. Dalam konteks inilah, saya mengusulkan beberapa stimulan kebijakan berikut:

Pertama, perlunya insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Komoditas ekspor Indonesia mayoritas berbasis buruh murah dan sumberdaya alam yang melimpah. Diturunkannya pajak ekspor dan bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang masih

diimpor dari luar negeri akan sangat membantu industri di tanah air.

Kedua, usulan untuk memberi stimulus bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) layak untuk diperhatikan. Beberapa stimulus yang mendesak adalah diturunkannya Pajak Pertambahan Nilai Impor Kapas maupun kapas dalam negeri, diturunkannya suku bunga untuk mendorong investasi, dan mempercepat restitusi pajak. UMKM sudah berperan sebagai pencipta kesempatan kerja, penyumbang PDB, dan penghasil devisa selama ini, barangkali sudah saatnya mencanangkan UMKM sebagai “sektor prioritas”. Cina dan India secara aktif memberikan insentif dan dukungan kebijakan bagi

pelaku bisnis TPT agar dapat meningkatkan pangsa pasar sebelum dicabutnya kuota TPT. Selain itu, perlu didukung adanya *rescue program* untuk sentra-sentra UMKM yang dalam kondisi "darurat" akibat gempa, lumpur panas, dan bencana alam lainnya.

Ketiga, menggarap alternatif pasar di luar AS dan Eropa secara lebih serius. Alternatif pasar tersebut adalah Timur Tengah, Cina, dan India. Kunjungan saya ke Uni Emirat Arab baru-baru ini menunjukkan bahwa peluang ekspor Indonesia di negara dengan GNP per kapita lebih dari US\$42 ribu ini masih terbuka lebar untuk komoditas perhiasan, barang dari kulit, elektronika, mobil dan komponennya, garmen dan tekstil.

Keempat, Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI di luar negeri perlu difungsikan menjadi *market intelligence*. Peta peluang pasar dan informasi lingkungan industri di negara di mana pun perwakilan Indonesia berada perlu menjadi prioritas dan memiliki Pusat Informasi Pasar. ITPC (*Indonesia Trade Promotion Center*) di 11 negara, yang konon akan ditambah di 9 negara pada tahun 2009, perlu dijadikan *market outlet* yang lebih besar dengan dana dan suplai produk-produk unggulan Indonesia dari semua daerah. Sinergi antara Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Penda, dan Kadin perlu lebih diintensifkan untuk melakukan penetrasi produk dan pasar di kawasan Teluk maupun pasar-pasar yang prospektif lainnya. Dengan stimulan kebijakan seperti ini, semoga krisis

keuangan global tidak menjadi krisis jilid kedua di Indonesia.

Kendati dibayang-bayangi dampak krisis keuangan global, ekonomi Indonesia tahun 2009 diproyeksikan oleh pemerintah mampu tumbuh dengan 5%³. Target pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar ini lebih rendah dari tahun 2008 yang sebesar 6,2% dan masih di bawah asumsi APBN 2009 yang sebesar 6%. Ini menyiratkan optimisme sekaligus tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah di tengah krisis global.

Optimisme itu terlihat jelas saat Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani menyampaikan siaran pers tentang "Evaluasi ekonomi 2008 dan prospek 2009 oleh pemerintah RI" tanggal 5 Januari lalu. Dengan defisit APBN 2008 yang hanya mencapai 0,1% dari PDB dan jauh lebih rendah dari rencana semula 2,1% dari PDB, Pemerintah menyajikan bukti-bukti keberhasilan mencapai *pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs*. Pertumbuhan ekonomi di era SBY (2005-8) tercatat rata-rata per tahun 6%, yang jauh lebih tinggi dibanding masa Megawati yang hanya 4% per tahun. Dengan pertumbuhan sebesar ini, pengangguran dan tingkat kemiskinan berangsur turun. Tingkat kemiskinan menurun dari 16,7% di tahun 2004 menjadi 15,4% tahun 2008; jumlah orang miskin sedikit menurun dari 36,1 juta menjadi 35 juta orang. Tingkat pengangguran menurun dari 11,24% tahun 2005 menjadi 8,46% tahun 2008. Kendati demikian, kinerja ini harus diakui masih jauh dari harapan masyarakat dan sasaran pemerintah SBY yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2004-2009.

Pemerintah mengumumkan akan menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBN 2008 sebesar Rp 51,3 triliun untuk memberi stimulus mendorong

³ Perbandingan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008-2009 versi pemerintah lebih tinggi daripada prakiraan menurut lembaga internasional seperti ADB, World Bank, IMF, Economist, yang masing-masing memprediksi Indonesia hanya tumbuh 4,4%, 4,5%, 4,5%, 3,3%.

pertumbuhan ekonomi dan mengerem gelombang PHK tahun ini. Melalui stimulus fiskal, pemerintah mencoba mengantisipasi merosotnya aktivitas ekonomi nasional khususnya ekspor. Pertumbuhan ekspor kuartal pertama 2008 yang sebesar 15,5% terbukti turun 6,1% pada kuartal keempat menjadi 9,4%. Penurunan ekspor ini lebih banyak disebabkan kondisi pasar produk ekspor Indonesia di Amerika dan Eropa, yang kena dampak langsung krisis ekonomi global. Pemerintah dan produsen produk ekspor harus berusaha keras membuka pasar baru, seperti Timur Tengah, Afrika, India, Amerika Latin, bila tidak mau kinerja ekspor kita terus menurun.

Harus diakui, di masa pemerintahan SBY, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi makro sudah jauh menurun dibanding masa lalu. Angka-angka indikator makro ekonomi pun boleh dikata berada dalam kondisi relatif "aman". Masalahnya, apakah ekonomi Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat dalam jangka menengah menghadapi krisis global?

Ada beberapa risiko dan ancaman yang harus dicermati oleh pemerintah di tahun 2009. Pertama, sektor riil masih "terseok-seok", dengan laju pertumbuhan rendah dan pangsa pasar yang menurun. Prioritas stimulus perlu diberikan kepada industri yang padat tenaga kerja, berorientasi ekspor, dan *sunset industry*. Komoditas ekspor Indonesia mayoritas berbasis buruh murah dan sumberdaya alam yang melimpah. Diturunkannya pajak ekspor dan bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang masih diimpor dari luar negeri akan sangat membantu industri di tanah air.

Kedua, salah satu asumsi dasar penyusunan APBN 2009 adalah harga minyak mentah dunia dipatok US\$100 per barel. Perubahan harga minyak mentah dunia mengandung risiko tambahan defisit APBN. Harga minyak yang cenderung menurun saat ini masih sulit diperkirakan.

Dalam semester pertama 2008 harga minyak melonjak hingga US\$147 per barel. Pada Juli dan awal Agustus 2008, harga minyak internasional merosot menjadi 115 dolar AS/per barel. Namun harga minyak sekarang mencapai kurang dari US\$40/barel. Apabila reliansi harga minyak jauh di bawah USD 100 sepanjang 2009, dapat dipastikan akan menimbulkan risiko fiskal yang tidak kecil. Target penerimaan migas dipastikan berkurang, sementara beban subsidi energi (BBM dan listrik) juga mengalami penurunan, dana transfer ke daerah melalui Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga menurun. Yang terakhir akan menimbulkan komplikasi tersendiri bagi pemma yang sampai kini masih

mengandalkan dana bagi hasil dan DAU dari pusat.

Ketiga, fokus menggarap pasar domestik pun sebenarnya sangat penting dilakukan. Di tengah lesunya permintaan luar negeri, sudah saatnya menggarap pasar domestik lebih intensif. Diwajibkannya penggunaan produk tradisional seperti batik dan tenun ikat di berbagai daerah perlu dijadikan gerakan nasional gemar produk Indonesia. Pasar domestik pun dapat menjadi peluang untuk menyerap produk-produk berkualitas tersebut serta dapat menghambat gempuran produk ilegal dari Cina, India, Vietnam.

Kelima, pemerintah perlu mengakomodasi semua usulan yang disampaikan tiap sektor, Kadin, dan asosiasi bisnis. Inilah saatnya mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional versi pemerintah dan Road Map Industri Kadin. Untuk itu, paket-paket kebijakan di bawah Inpres No. 5/2008 perlu diperluas dan dipertajam dengan prioritas pada: kegiatan ekonomi yang menyerap banyak lapangan kerja secara signifikan, kegiatan yang mampu sebagai fondasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi, sektor yang berorientasi ekspor, dan UMKM yang terkena dampak krisis global maupun bencana alam.

KESIMPULAN

Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat terjadi sebagai akibat macetnya kredit properti (*subprime mortgage*), semacam kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan ambruknya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat. Sebelum krisis, Alan Greenspan, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menerapkan suku bunga rendah pada kisaran 1 hingga 2 persen. Yang menjadi masalah adalah lembaga keuangan pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) di AS tersebut banyak menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pembiayaan.

Krisis keuangan global yang terjadi di AS tersebut sudah dapat dipastikan akan merembet ke negara-negara lain, di mana krisis tersebut akan menyeret perekonomian negara-negara lain jatuh ke dalam resesi.

Menurut proyeksi IMF (2009), pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami penurunan atau resesi. Resesi terparah terjadi di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara eropa. Di negara-negara berkembang dampak krisis keuangan global ini sangat terasa dengan anjloknya pertumbuhan ekonomi walaupun di negara-negara tersebut output perekonomiannya masih akan tetap tumbuh positif.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia juga tidak luput dari imbas krisis global. Pada tahun 2008 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih meningkat 6,2%, yang berarti lebih rendah yang ditargetkan pemerintah sebesar 6,5%. Bahkan pada 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan turun drastis pada kisaran 4,5-5,5%. Indonesia terimbas resesi yang terjadi di AS dan negara-negara maju karena negara-negara tersebut merupakan

tujuan ekspor utama komoditas produk Indonesia. Dengan menurunnya permintaan akan produk Indonesia di negara-negara maju tersebut, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Hal tersebut tercermin dari menurunnya pertumbuhan nilai ekspor Indonesia.

UMKM sebagai usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan terbukti dapat bertahan di krisis 1998 juga terancam akan adanya krisis global ini. Krisis global ini telah berimbas kepada menurunnya permintaan bagi UMKM. Kebijakan BI menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi justru memperparah UMKM dalam mengakses kredit yang terjangkau. Ancaman adanya PHK pun tak dapat dihindarkan apabila permintaan produk-produk dari UKM terus menurun.

Stimulus fiskal diharapkan dapat menjadi "bahan bakar" agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap *on the right track*, setidaknya mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Stimulus ekonomi seharusnya dapat menjangkau UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah badai krisis. Stimulus kepada UMKM dapat diberikan dalam kemudahan pemberian kredit dan kredit lunak. Saat ini pemerintah harus fokus menggarap pasar dalam negeri saat pasar di luar negeri sedang melemah, hal ini dilakukan agar permintaan produk dalam negeri tetap terjaga dan meminimalkan ancaman terhadap kemungkinan terjadinya PHK. Selain itu, perlu didukung adanya *rescue program* untuk sentra-sentra UMKM yang dalam kondisi "darurat" akibat gempa, lumpur panas, dan bencana alam lain.

Pada 2009, diprediksi tingkat pengangguran terbuka akan mencapai 8,87% dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 107 juta orang. Dengan adanya stimulus fiskal, pengangguran terbuka diharapkan bisa ditekan menjadi 8,34%. Dengan kata lain, stimulus ini harus dapat menciptakan 150.000 lapangan kerja baru. Agar efektif, stimulus fiskal realisasinya harus benar-benar "mulus". Caranya hanya dapat dilakukan dengan akselerasi pencairan paket stimulus, yakni disalurkan ke sektor dan daerah pada semester pertama, setidaknya dapat dimulai Maret 2009.

